

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI



OLEH:

WAHYU SETYO ARYANTO

NPM: 20300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

WAHYU SETYO ARYANTO

NPM: 20300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI

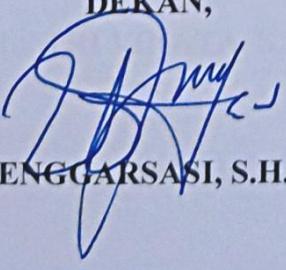
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA

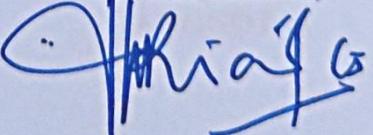


OLEH:
WAHYU SETYO ARYANTO
NPM: 20300046

SURABAYA, 22 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

WAHYU SETYO ARYANTO

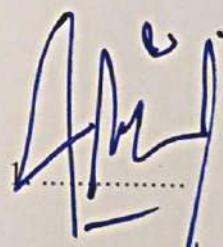
NPM: 20300046

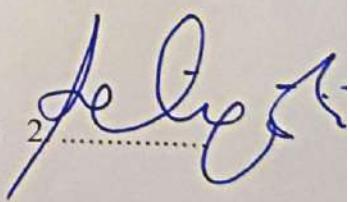
TELAH DIPERTAHANKAN

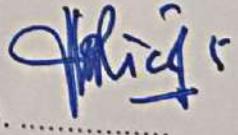
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H. (KETUA) 

2. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 

3. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Lestari...

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**" dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Skripsi ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap isu perubahan iklim yang dampaknya kian mengkhawatirkan dan membuat ironis masyarakat global. Dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam negara tertentu saja, tetapi juga mengancam semua negara yang ada di dunia terlebih bagi negara-negara kecil. Isu perubahan iklim ini tidak terlepas dari peran negara-negara industri besar yang turut berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi karbon. Padahal saat ini hampir semua negara termasuk negara-negara industri besar telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian lingkungan internasional terkait perubahan iklim dengan meratifikasi *Paris Agreement* yang bertujuan untuk membatasi laju kenaikan suhu bumi di bawah 2°C. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil topik skripsi tentang perubahan iklim yang kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan dorongan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Karena itulah penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Bapak Kristoni Tri Effendi dan Ibu Eko Winarsih selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya angkatan 2020. Maaf karena penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan selama kurang lebih 3,5 tahun ini.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum perubahan iklim. Penulis menyadari betul masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itulah semoga kedepannya terjadi pengayaan bagi pembaca dan saya selaku

penulis. Saya tutup dengan sebuah ungkapan dalam bahasa latin, “*custodire terram est custodire futurum*” yang secara sederhana bermakna menjaga bumi berarti menjaga masa depan.

Surabaya, 28 Desember 2023

Penulis

Wahyu Setyo Aryanto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Setyo Aryanto
NPM : 20300046
Alamat : Widodaren Kidul RT 03/RW 02, Kel. Widodaren, Kec. Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
No. Telp. (HP) : 081382258015

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2023

Yang Menyatakan,



(WAHYU SETYO ARYANTO)

NPM: 20300046

ABSTRAK

Isu perubahan iklim merupakan permasalahan yang pada saat ini menjadi perhatian serius masyarakat global dan menjadi tanggung jawab dari seluruh negara di dunia mengingat semua negara khususnya negara kecil sangat rentan merasakan dampak dari perubahan iklim. Pada tahun 2015 silam terjadi suatu momentum penting dalam sejarah global karena untuk pertama kalinya sebanyak 195 negara telah berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan disahkannya perjanjian internasional multilateral bernama *Paris Agreement* yang bertujuan membatasi laju kenaikan suhu bumi di bawah 2°C atau mengupayakan pada angka 1,5°C. Namun pasca berlakunya *Paris Agreement*, berdasarkan data terakhir dari *Climate Watch* dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2019 emisi dunia justru mengalami peningkatan. Data dari *Climate Watch* menunjukkan bahwa sebelum berlakunya *Paris Agreement* total emisi dunia sebesar 47.7 GtCO₂e di tahun 2016, sedangkan pasca berlakunya *Paris Agreement* tercatat total emisi dunia di tahun 2017 sebesar 48.4 GtCO₂e, tahun 2018 sebesar 49.6 GtCO₂e, dan tahun 2019 sebesar 49.9 GtCO₂e. Hal inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, kekeringan berkepanjangan, badai ekstrem, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara peratifikasi *Paris Agreement* dapat bertanggung jawab secara internasional apabila ada negara kecil yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim, setidaknya ada empat bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan yaitu dengan restitusi, kompensasi, pemuasan, dan bunga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terbagi menjadi dua yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase. Sedangkan secara litigasi melalui Mahkamah Internasional.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Negara, Negara Kecil, *Paris Agreement*

ABSTRACT

The issue of climate change is a problem that is currently a serious concern of the global community and is the responsibility of all states in the world considering that all states, especially small states, are very vulnerable to feel the effects of climate change. In 2015 there was an important momentum in global history because for the first time as many as 195 states have committed to fight climate change with the passage of a multilateral international agreement called the Paris Agreement which aims to limit the rate of increase in the earth's temperature below 2°C or strive for 1.5°C. However, after the entry into force of the Paris Agreement, based on the latest data from Climate Watch in the range of 2016 to 2019, world emissions actually increased. Data from Climate Watch shows that before the entry into force of the Paris Agreement total world emissions amounted to 47.7 GtCO₂e in 2016, while after the entry into force of the Paris Agreement recorded total world emissions in 2017 of 48.4 GtCO₂e, in 2018 of 49.6 GtCO₂e, and in 2019 of 49.9 GtCO₂e. This ultimately affects the increasingly worrying impacts of climate change such as changing weather patterns, prolonged droughts, extreme storms, certain species of flora and fauna that are threatened with extinction, and increasing sea intensity due to melting polar ice which will ultimately threaten the existence and sovereignty of small states. In this study, there are two issues that will be discussed, namely the responsibility of Paris Agreement ratification state to small states affected by climate change and legal remedies that can be taken by small states to Paris Agreement ratification state for the impacts of climate change experienced. This study aims to analyze and determine the form of responsibility of Paris Agreement ratification state for small states affected by climate change and legal remedies that can be taken by small states against Paris Agreement ratification state for the impacts of climate change experienced. This research is a type of normative research and uses three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study show that basically states ratifying the Paris Agreement can be responsible internationally if there are small states that are harmed due to the effects of climate change, there are at least four forms of responsibility that can be done, namely with restitution, compensation, satisfaction, and interest. The results of this study also show that legal remedies that can be carried out by small states are divided into two, namely non-litigation and litigation. Non-litigation through negotiation, mediation, conciliation, UN organizational framework, and arbitration. While litigation through the International Court of Justice.

Keywords: Climate Change, State Responsibility, Small States, Paris Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Kerangka Konseptual.....	9
5.1 Konsep Dasar Perubahan Iklim.....	9
5.2 Kajian Teoritis Paris Agreement.....	11
5.3 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara.....	14
5.4 Analisis Teoritis Negara Kecil	17
6. Metode Penelitian	19
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	19
6.2 Bahan Hukum.....	20
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
6.4 Analisis Bahan Hukum	21
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21
BAB II TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM.....	23
1. <i>Paris Agreement</i> Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim .	23
2. Tanggung Jawab Negara Peratifikasi <i>Paris Agreement</i> Menurut Hukum Internasional.....	34

2.1 Kasus-Kasus Internasional Terkait Tanggung Jawab Negara.....	44
2.1.1 <i>Trail Smelter Case</i> 1941 (<i>United States v. Canada</i>).....	44
2.1.2 <i>Whaling In The Antarctic Case</i> 2014 (<i>Australia v. Japan : New Zealand Intervening</i>).....	48
2.2 <i>Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles 2001)</i>	53
3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara Peratifikasi <i>Paris Agreement</i> ...	68
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA KECIL TERHADAP NEGARA PERATIFIKASI PARIS AGREEMENT ATAS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI	73
1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kedaulatan Negara Kecil	73
1.1 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Kiribati.....	74
1.2 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Burundi	78
2. Upaya Hukum Bagi Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim	80
2.1 Upaya Hukum Melalui Non-Litigasi	82
2.2 Upaya Hukum Melalui Litigasi.....	85
BAB IV PENUTUP	102
1. Kesimpulan	102
2. Saran.....	104
DAFTAR BACAAN	105